

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah DISYANJAK Kota Bandung

Sejarah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sejauh ini telah mengalami perubahan, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja

yaitu:

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada Tahun 1980, di keluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja di rubah menjadi 7 (tujuh) satuan unit kerja, yaitu :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan suatu operasional satuan unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak retribusi, di pakai sistem MAMPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) sebagai landasan bagi Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Dinas Pendapatan

Daerah Tingkat I maupun tingkat II yang merupakan pedoman dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-830 Tahun 1981 serta Keputusan Menteri Dalam negeri No. KUPD 7/12/41101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendapat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II. Dengan system MAPENDA petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak / retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi “*door to door*”.

Guna terdapat keragaman Struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, di keluarkan Keputusan menteri Dalam negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang di tindak lanjuti oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan di keluarkannya Keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989 perlu di susun sistem dan prosuder Perpajakan. Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah di tetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur

Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamdy Daerah tingkat II Seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih di kenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka Sistem Pemungutan Retribusi Daerah yang sebelumnya di lakukan secara "*Door to door*" Menjadi "*Self Assesment*" yaitu Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menyeter langsung kewajiban

Pembayaran Pajak/Retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah. Dengan berlakunya Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 978-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang system dan prosedur yang telah di tetapkan terlebih dahulu dalam pemungutan lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah

Indonesia, sudah tidak sesuai lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut, Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain perlu diatur kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-lain Menteri Dalam Negeri. Dalam pasal 2 Keputusan ini menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah terdiri dari beberapa:

- a. Pendaftaran dan Pendataan.
- b. Penetapan.
- c. Penyetoran.
- d. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran.
- e. Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Keberatan Banding.
- g. Penagihan.
- h. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi, dan Pengembalian kelebihan pembayaran.

3.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, yang membawahi :

1. Bagian Umum dan Kepegawaiaan

2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program dan Anggaran

c. Bidang Perencanaan, yang membawahi :

1. Seksi Data dan Potensi pajak
2. Seksi Perencanaan Pajak Daerah
3. Seksi Analisa dan Pelaporan

d. Bidang Pajak Pendaftaran, yang membawahi :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan
3. Seksi Penyelesaian Piutang

e. Bidang Pajak Penetapan, yang membawahi :

1. Seksi Penilaian Dan Pengaduan
2. Seksi Penetapan dan Pembukuan
3. Seksi Penagihan

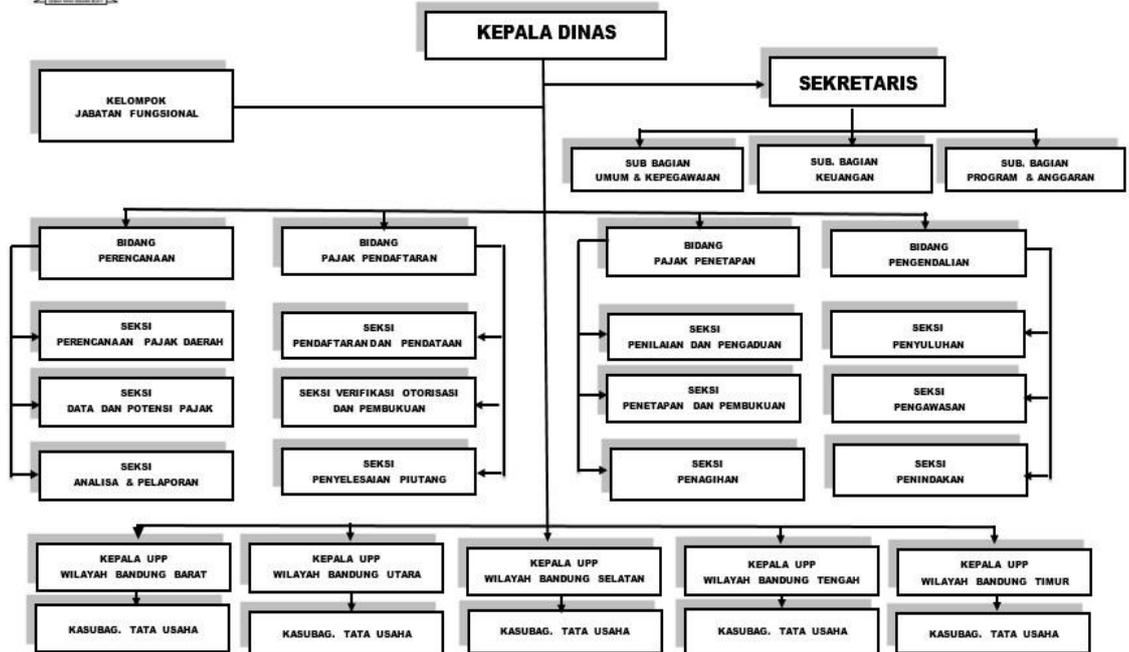
f. Bidang Pengendalian, yang membawahi :

1. Seksi Pembinaan Penyuluhan
2. Seksi Pengawasan
3. Seksi

Penindakan



SOTK DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
BERDASARKAN PERDA NO. 05 TANGGAL 07 JANUARI TAHUN 2013



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan

3.1.3.1 Visi

“Profesional dalam pengelolaan pajak daerah, prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat”

3.1.3.2 Misi

1. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur.
2. Penataan sistem dan prosedur pemungutan serta pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana

3.1.4 Kegiatan Operasional Perusahaan

Kegiatan kebijakan yang akan menjadi landasan dalam sistem operasional dan aktivitas organisasi yang dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung:

1. Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, secara kontinyu serta membuat solusi apabila ditemukan sesuatu permasalahan.
2. Pemberdayaan informasi, komunikasi dalam berbagai media seperti media elektronik dan media cetak.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat, melalui berbagai pendidikan.
4. Peningkatan sistem penagihan mempermudah dan mempercepat bagi wajib pajak dalam pembayaran, dengan memperbanyak tempat pembayaran dan penagihan.
5. Penegakan sanksi hukum bagi petugas dan wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

3.1.4.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pelayanan pajak Kota Bandung yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan.
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan.
3. Menyelenggarakan kesekretariatan.

3.1.4.2 Pelaksanaan Kegiatan Organisasi

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung melaksanakan kegiatan organisasi sebagai:

- a. Melaksanakan kegiatan pendaftaran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- b. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak atau retribusi.
- c. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- d. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak atau retribusi.
- e. Melaksanakan kegiatan atau melayani keberatan dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- f. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan.
- g. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan penggalian potensi pajak dan retribusi.
- h. Melaksanakan kegiatan penyuluhan baik langsung ataupun tidak langsung dengan melalui berbagai media.

3.2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah atau penelitian dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh. Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, perlu adanya metode untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, maka diperlukan metode dan pengumpulan data.

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kombinasi antara apa yang hendak diperoleh setelah melakukan penelitian (tujuan penelitian) dengan unsur-unsur penelitian. Desain penelitian dapat merupakan keterkaitan suatu desain dengan desain yang lain yang secara bersama-sama membentuk sebuah desain penelitian.

3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini di gunakan jenis dan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.2.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam memperoleh data primer, metode pengumpulan data yang dapat digunakan adalah :

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke perusahaan dengan harapan bahwa keadaan yang sebenarnya dapat diketahui. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengamati cara kerja berdasarkan sistem yang sedang berjalan.

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan seksi penyajian data dan informasi serta ke seksi

administratif kepegawaian umum yang ada kaitannya dengan sistem pendaftaran Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

3.2.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil olahan orang lain. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, buku pustaka, jurnal penelitian ataupun media cetak atau elektronik. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh adalah buku pustaka, dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian seperti faktur pembelian, nota penjualan dan catatan- catatan yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Adapun metode pendekatan dan pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis, yaitu:

3.2.3.1. Metode Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem yang penulis ambil adalah analisis dan perancangan berorientasi objek, digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan organisasi dari sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan sub modul, perancangan berorientasi objek juga menunjukkan hubungan elemen data dan elemen kontrol antara hubungan modulnya.

Model analisis harus dapat mencapai tiga sasaran utama, yaitu menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh pengguna, membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, membatasi serangkaian persyaratan yang dapat *divalidasi* begitu perangkat lunak dibangun.

Dengan demikian perancangan berorientasi objek dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan sistem dipandang dari elemen data menggunakan alat bantu seperti : *Use case* Diagram merupakan kumpulan skenario yang mendeskripsikan hubungan antara para pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. *Use case* diagram menampilkan relasi antara aktor dan *use case*. Diagram *class* digunakan untuk mendeskripsikan jenis-jenis obyek pada sebuah sistem dan hubungan yang terdapat diantara mereka. Diagram *class* juga menunjukkan properti dan operasi sebuah *class* dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan obyek tersebut. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara obyek di dalam dan di sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. *Activity* diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. Dalam beberapa hal, diagram ini memainkan peran mirip sebuah diagram alir, tetapi perbedaan prinsip antara diagram ini dan notasi diagram alir adalah diagram ini mendukung proses paralel. *Deployment* diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dibangun dalam infrastruktur sistem, dimana komponen akan terletak (pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi *server*, dan hal-hal lain yang bersifat fisik. Sebuah *node* adalah *server*, *workstation*, atau piranti keras lain yang digunakan untuk membangun komponen dalam lingkungan sebenarnya. Dengan kata lain diagram ini memperlihatkan pemetaan *software* kepada *hardware*.

3.2.3.2. Metode Pengembangan Sistem

Metode *prototype* sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi manajemen, tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Metode ini dikatakan revolusi karena merubah proses pengembangan sistem informasi yang lama (SDLC).

Menurut literatur, yang dimaksud dengan prototipe (*prototype*) adalah "model pertama", yang sering digunakan oleh perusahaan industri yang memproduksi barang secara masa. Tetapi dalam kaitannya dengan sistem informasi definisi kedua dari *Webster* yang menyebutkan bahwa "*prototype is an individual that exhibits the essential peatures of later type*", yang bila diaplikasikan dalam pengembangan sistem informasi manajemen dapat berarti bahwa *Prototype* tersebut adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. *Prototype* sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu.

Dalam beberapa hal pengembangan *software* berbeda dengan produkproduk manufaktur, setiap tahap atau fase pengembangan sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses yang harus dilakukan. Proses ini umumnya hanya untuk satu produk dan karakteristik dari produk tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti seperti produk

manufaktur, sehingga penggunaan "model pertama" bagi pengembangan *software* tidaklah tepat. Istilah *prototyping* dalam hubungannya dengan pengembangan *software* sistem informasi manajemen lebih merupakan suatu proses bukan *prototype* sebagai suatu produk.

3.2.3.3. Alat Bantu Analisis dan Perancangan Sistem

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah "bahasa" yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem dengan berfokus pada objek UML. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan syntax/simantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki makna tertentu, dan UML *syntax* mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Penulis menggunakan beberapa jenis diagram, yaitu :

1) *Use Case Diagram*

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah "apa" yang diperbuat sistem, dan bukan "bagaimana". Sebuah *use case* merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.

Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh actor. *Use case* digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi dituliskan di dalamnya. Aktor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke *use*

case. (Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

2) *Activity diagram*

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. *Activity diagram* juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.

Diagram statechart terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Titik awal (*start*) merupakan awal dari suatu proses.
- b. *Activity* menunjukkan aktivitas yang dilakukan.
- c. *Transition* menunjukkan alur perubahan dari satu *activity* ke *activity* yang lain.
- d. Titik akhir (*end*) merupakan akhir dari suatu proses.

(Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

4) *Sequence diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa *message* yang digambarkan terhadap waktu. *Sequence diagram* terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).

Diagram *sequence* terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Partisipan merupakan berbagai macam obyek dalam sistem.
- b. Pesan dikirimkan dari partisipan satu ke partisipan yang lain
- c. Aktivasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh partisipan
- d. Garis alir biasanya berbentuk garis putus-putus yang menghubungkan antara partisipan dengan aktivitas. (Sumber: Tutorial Rational Rose 2000, oleh Mushlihudin, mdin@tsk.ee.itb.ac.id)

5) **Class Diagram**

Class Diagram digunakan untuk mendeskripsikan jenis-jenis obyek pada sebuah sistem dan hubungan yang terdapat diantara mereka. Diagram *class* juga menunjukkan properti dan operasi sebuah class dan batasan-batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan obyek tersebut. Diagram *class* terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Nama.
- b. Atribut.
- c. Metode/operation.

Analisis sistem merupakan proses memilah-milah suatu permasalahan menjadi elemen-elemen yang lebih kecil untuk dipelajari guna mempermudah permasalahan dari suatu sistem informasi. Hasil akhir dari analisis sistem merupakan cara pemecahan masalah yang terjadi dalam spesifikasi sistem baru.

Pada tahap analisis diperlukan suatu pendekatan analisis guna menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul pada tahap berikutnya, yaitu perancangan sistem baru. Karena pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, pendekatan yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah pada sistem yang sedang berjalan dan sekaligus melakukan evaluasi setiap cara kerja sistem yang sedang berjalan berdasarkan prosedur-prosedur yang ada. Sehingga akan diketahui permasalahannya serta kesulitan apa saja yang dihadapi oleh sistem yang sedang berjalan, apa saja pengaruhnya dan harus diperhatikan validasinya terhadap sasaran sistem yang dirancang sebelum dilakukan perbaikan.

Tahap analisis sistem merupakan tahap yang sangat kritis dan penting karena semua kesalahan pada tahap berikutnya bersumber pada kesalahan tahap analisis sistem. Oleh karena itu seorang analisis sistem harus cermat memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi sedini mungkin.

Langkah dasar tahap analisis sistem adalah :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi (*identify*),
2. Memahami permasalahan (*understand*),
3. Menganalisis sistem (*analyze*) dan
4. Membuat laporan hasil analisis sistem (*report*).

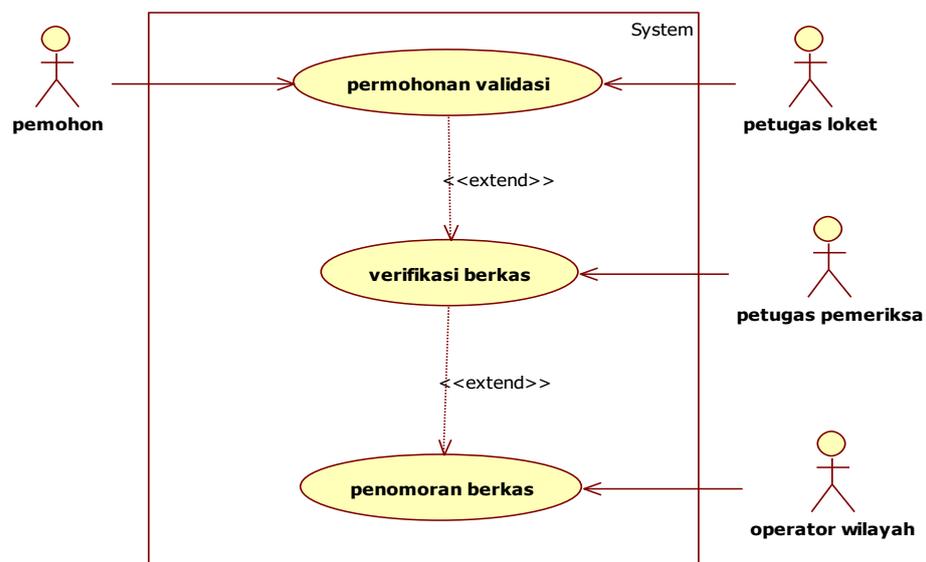
3.3. Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan

Pada analisis prosedur ini, harus diketahui prosedur yang sedang berjalan untuk perancangan sistem yang baru. Harus diketahui pula hal-hal yang menjadi tujuan pemakai sehingga masalah tersebut dapat didefinisikan secara jelas.

3.3.1 Use Case Diagram

Use Case merupakan perilaku software aplikasi dimana proses tersebut menggambarkan suatu sistem, sehingga yang menggunakan sistem akan mudah mengerti mengenai kegunaan sistem yang dibangun.

Use Case Diagram adalah gambaran (graphical) dari beberapa *actor*, *UseCase*, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. *Use case Diagram* menggambarkan siapa saja aktor yang melakukan prosedur dalam sistem serta fungsi-fungsi (proses) yang terlibat dalam transformasi pada sistem tersebut. Adapun *use case diagram* yang berjalan saat ini pada sistem penerimaan BPHTB di Disyanjak Kota Bandung yaitu :



Gambar 3.6 Use Case Diagram yang sedang Berjalan

3.3.2. Skenario *Use Case*

Skenario *use case* mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam sistem, serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Berikut adalah skenario *use case* yang berjalan saat ini di kantor Disyanjak Kota Bandung, yaitu :

1. Skenario *Use Case* Permohonan
 - Nama *Use Case* : Permohonan Validasi
 - No. *Use Case* : 001
 - Aktor : Pemohon
 - Fungsi : Sebagai proses Permohonan validasi
BPHTB

Tabel 3.1 Skenario *Use Case* Sistem Permohonan

Pemohon		Petugas	
1	meberikan berkas pemohonana validas.		
		2	Merima dan mengecek berkas permohonan validasi, jika berkas belum lengkap dikembalikan ke pemohon

2. Skenario *Use Case* Verifikasi data
 - Nama *Use Case* : Permohonan Validasi
 - No. *Use Case* : 002
 - Aktor : Loker dan Petugas Pemeriksa

Fungsi : Sebagai proses verifikasi data
Registrasi BPHTB

Tabel 3.2 Sekenario *Use Case* Sistem verifikasi data

Petugas Loker	Petugas Pemeriksa
1. Memberikan berkas verifikasi	
	2. Melakukan Verifikasi berkas dan membubuhi paraf sebagai bukti dokumen telah diperiksa.

3. Skenario *Use Case* Penomoran

Nama <i>Use Case</i>	: Penomoran Registrasi
No. <i>Use Case</i>	: 003
Aktor	: Petugas Pemeriksa dan Operator Wilayah
Fungsi	: Sebagai proses pemberian nomor Registrasi BPHTB

Tabel 3.3 Skenario *Use Case* Sistem penomoran data

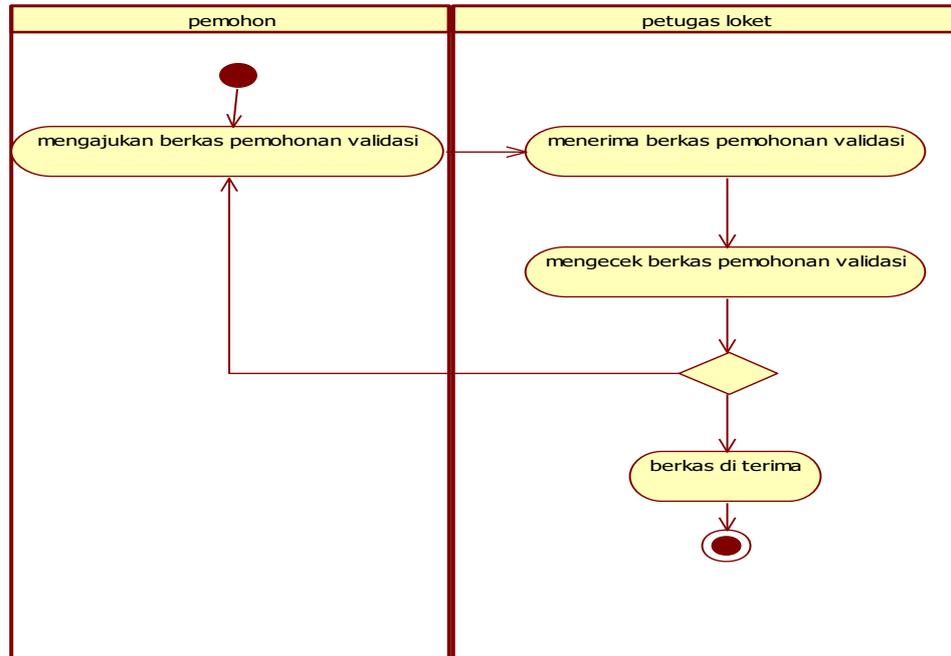
Petugas pemeriksa	Operator Wilayah
1. Menyerahkan berkas pemohonan ke operator wilayah.	
	2. Melakukan pemberian nomor validasi berdasarkan data pemohonan validasi.

3.3.3. *Activity Diagram*

Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem yang berjalan pada Disyanjak Kota Bandung yang bertujuan untuk melihat alur proses sistem yang sedang berjalan.

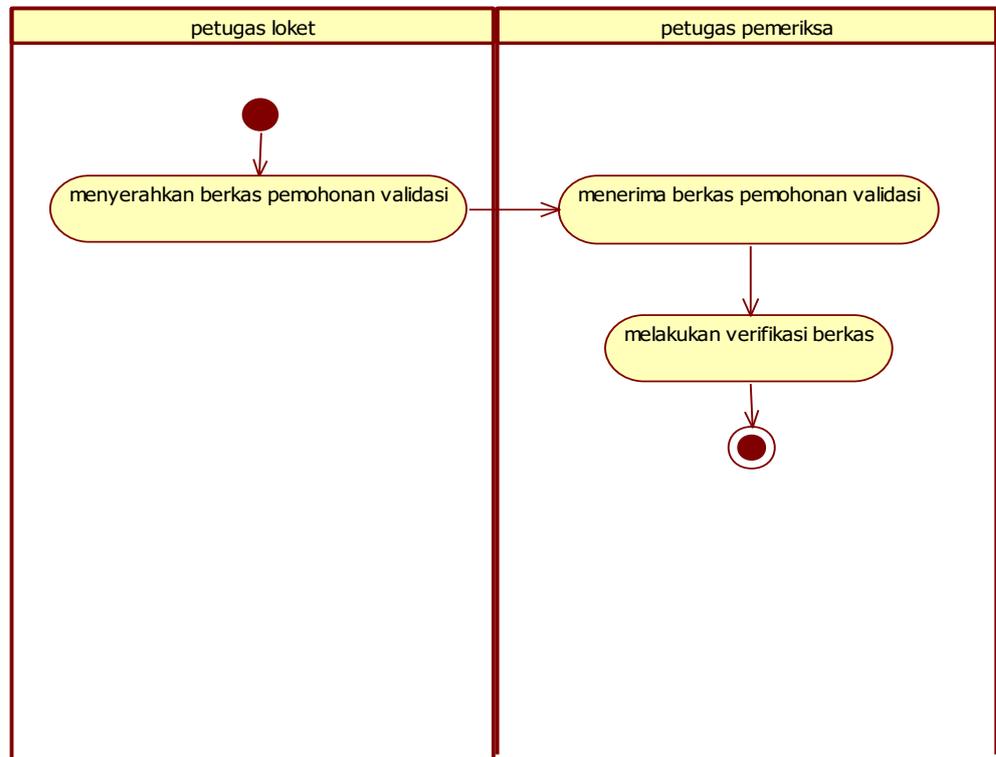
1. *Activity Diagram* penerimaan yang Berjalan

Sistem penerimaan BPHTB pada Disyanjak Kota Bandung masih dilakukan dengan manual. Pemohon harus datang ke Kantor pelayanan untuk pemohonan validasi.



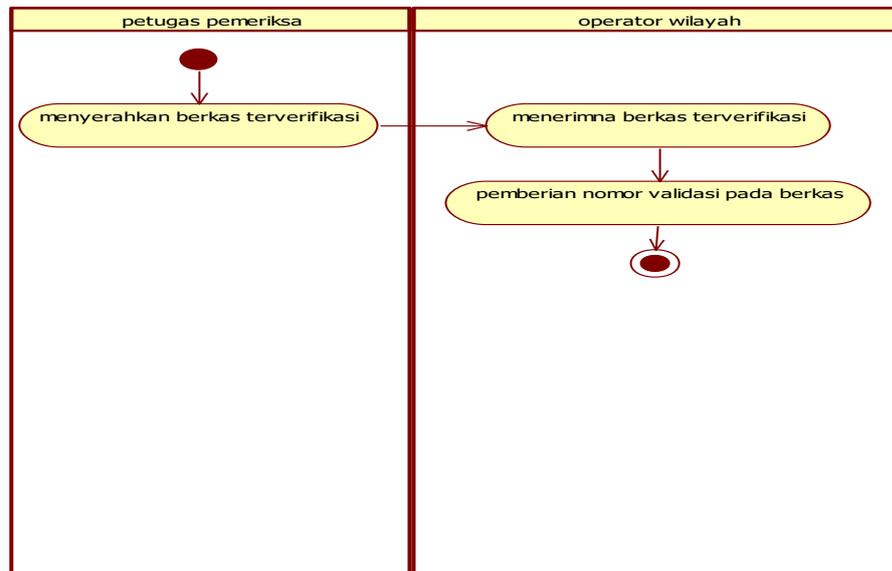
Gambar 3.7 *Activity Diagram* permohonan validasi yang Berjalan

2. Activity diagram verifikasi



Gambar 3.8. *Activity diagram* verifikasi Permohonan

3. Activity diagram pemberian nomor



Gambar 3.8. *Activity diagram* Pemberian nomor registrasi

3.4. Evaluasi Sistem yang Sedang Berjalan

Melihat sistem Pengolahan data yang masih menggunakan sistem manual, maka dapat disimpulkan beberapa kekurangan dalam prosedur yang sedang berjalan, diantaranya :

Tabel 3.4 Evaluasi Sistem yang Berjalan

No.	Permasalahan	Bagian	Solusi
	<p>Pada saat update data terbaru biasanya orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut sering berubah, sehingga sering terjadi kesalah pahaman dalam Pengolahan Data.</p>	<p>Petugas loket</p>	<p>Membangun sistem yang dapat mengotrolpengelolaan data agar tidak ada redudansi data.</p>
	<p>Masih terdapat data atau file yang tidak sesuai di dalam satu provinsi, seharusnya setiap data harus sesuai dengan data yang benar.</p>	<p>Petugas loket, Petugas Pereriksaan, Operator Wilayah</p>	<p>Membangun sistem terkomputerisasi untuk pengolahan data secara efektif</p>
	<p>Belum efektifnya pengelolaan data karena regional Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia terlalu banyak dan menghambat untuk penginputan data</p>	<p>Pemohon</p>	<p>Mempersiapkan data dengan focus untuk menginput regional atau daerah-daerah yang ada di Indonesia.</p>

